

FORUM

MEMPERTANYAKAN LIBERALISASI PENDIDIKAN

Liberalisasi Jasa Pendidikan pada Pendidikan Tinggi di Indonesia:
Peluang & Tantangan

**DOSEN WALI SEBAGAI PEMBIMBING AKADEMIS:
MUNGKINKAH ?**

KESENJANGAN PENDIDIKAN

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN
SISTEM PENDIDIKAN REPUBLIK RAKYAT CINA-INDONESIA**

**RELEVANSI PENDIDIKAN DALAM
PERSPEKTIF SEJARAH**

**KEHARUSAN PERUBAHAN PARADIGMA PENDIDIKAN POLITIK:
TAWARAN PREPOSISI AWAL**

**PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING
PENDIDIKAN TINGGI**

**PERLUNYA PROFESIONALITAS
TENAGA PENDIDIK**

**FUNGSI PARTISIPASI RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH**

FORUM

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Penerbit :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Terbit Pertama kali bulan Februari
1972

Penanggung Jawab :

Drs. Warsito, SU
Dra. Sri Widowati H, MS
Drs. Agus Hermani, MM
Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin

Ketua Penyunting

Drs. Suwanto Adhi, MSi

Sekretaris Penyunting

Agus Naryoso, S.Sos

Penyunting Pelaksana

Dra. Endang Larasati, MS
Drs. Tri Cahyo Utomo, MA
Dr. Turnomo Rahardjo
Dra. Rodhiyah, MSi

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Y. Warella, MPA (Undip)
Prof. Dr. Sudharto PH, MES (Undip)
Dr. Ari Pradhanawati, MS (Undip)
Dra. Hartuti Purnaweni, MPA (Undip)
Prof. Dr. Roger Paget (USA)
Dr. Peter Suwarno (USA)
Dr. Dedy Nur Hidayat (UI)

Tata Usaha

Drs. Moch Jaiz
Staf Tata Usaha FISIP-Undip

Alamat

MPIIS Forum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo SH No. 1 Semarang
Telp. (024) 8442532, 8414513
Fax. (024) 8449629
mad : mpiis-forum@usa.net

Isi Nomor Ini

kg

Pengantar 3

Artikel Utama

Sudharto P. Hadi :

Liberalisasi Jasa Pendidikan Pada Pendidikan
Tinggi di Indonesia : Peluang dan Tantangan 1

Retno Sunu Astuti :

Dosen Wali Sebagai Pembimbing Akademis :
Mungkinkah ? 6

Joyo Nur Suryanto Gono :

Kesenjangan Pendidikan 13

Sri Suwitri :

Perbandingan Kebijakan Sistem Pendidikan
Republik Rakyat Cina - Indonesia 19

Suwanto Adhi :

Relevansi Pendidikan Dalam Perspektif
Sejarah 32

Nur Hidayat Sardini :

Keharusan Perubahan Paradigma Pendidikan
Politik : Tawaran Preposisi Awal 36

Edi Santoso :

Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan
Tinggi 42

Agus Hermani DS :

Perlunya Profesionalitas Tenaga Pendidik 57

Margaretha Suryaningsih :

Fungsi Partisipasi Rakyat Dalam Mewujudkan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Yang Bersih 64

Sumbangan Tulisan :

Redaksi menerima sumbangan tulisan/foto yang relevan dengan tema atau topik pada setiap penerbitan. Setiap foto haruslah disertai dengan foto copy identitas yang jelas. Setiap artikel yang dikirimkan menjadi hak sepenuhnya dari redaksi untuk mengedit dan menampilkannya.

KESENJANGAN PENDIDIKAN

Oleh: *Joyo Nur Suryanto Gono* *

Abstract:

Educational gap has always been a difficult problem due to its relationship to poverty culture. Educational liberalization sharpened the gap between the have and the poor and built discriminative character, so it

is eventually closed the opportunity for the poor to get a proper education. The way out of this problem is through the democracy in the educational sector.

Key Words: Gap, educational, liberalization, poverty

A. Pendahuluan

Kapan sekolah dibiayai negara atau gratis bagi peserta didik selamanya terlaksana di seluruh Indonesia? Kalau kita membuka kembali Pembukaan UUD'45 akan nampak tujuan hidup bernegara kita antara lain adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa" serta "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Namun demikian penghayatan atas Pembukaan UUD'45 itu nampaknya terhambat oleh berbagai kepentingan yang berorientasi pada penguasaan sumber-sumber hidup secara ekonomi baik secara pribadi maupun kelompok, dilakukan secara beretika maupun tidak. Bahkan contoh yang tidak beretika bisa kita lihat dari beberapa media mengenai banyaknya para pejabat diberbagai tingkat melakukan korupsi, pengangkatan kepala sekolah maupun rekrutment karyawan ataupun guru wajib menyetor ke pimpinan daerah atau dewan. Hal itu dimungkinkan terjadi oleh sebab pimpinan daerah maupun anggota dewan harus mengembalikan modal yang tidak sedikit untuk kepentingan kampanye, dana partai dan dewan dalam pilkada. Barangkali fakta itu hanya menunjukkan bahwa berbagai cara ditempuh untuk berlomba mengumpulkan harta benda bagi kelangsungan hidup pelakunya bagi kepentingan sendiri dan kelompoknya, tetapi masih banyak cara lain yang tentunya

bertujuan sama. Cara pandang masyarakat yang seperti ini akan menyulitkan untuk terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial apalagi membuat cerdas kehidupan bangsa.

Kalau kita menengok kondisi sosial ekonomi masyarakat dan coba berasumsi untuk mengaitkan hal itu dengan kegiatan kependidikan kita maka akan nampak kaitan yang erat, bahwa kegiatan kependidikan kita sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kejadian-kejadian yang diberitakan berbagai media setelah "berubahnya" harga BBM, yang menarik perubahan harga-harga dan memunculkan berbagai kesulitan hidup di masyarakat, ternyata sangat mempengaruhi orang tua membiayai sekolah anak-anaknya. Kita tidak perlu repot dengan proyek penelitian besar soal siapa yang paling besar terkena imbas perubahan harga BBM ini karena sudah jelas rakyat miskin yang dari dulu tidak pernah bangkit dari kemiskinan, kini semakin sekarat. Bagi mereka berpikir soal makan saja sangat rumit apalagi berpikir soal sekolah.

Sementara kalau kita pergi ke kota, sekolah-sekolah yang termasuk kategori favorit dari mulai TK hingga SMA, setiap pagi di depan sekolah macet oleh kendaraan mobil dari mewah hingga butut dari para pengantar yang tentunya minoritas. Secara mayoritas situasi lain dapat terlihat dari padatnya angkutan kota oleh para pelajar hingga mereka harus bergelantungan di luar pintu yang sangat membahayakan bahkan tidak nyaman. Berbeda dengan situasi di pedesaan yang jauh dari ibukota propinsi

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip Semarang

maupun kabupaten, perbedaan ditandai dengan kebersihan pakaian atau penggunaan sepatu ketika pergi bersekolah. Daftar panjang masih bisa dikemukakan untuk menunjukkan kesenjangan dalam kegiatan pendidikan ini di Indonesia.

B. Pembahasan

I. Kemiskinan dan Pendidikan

Membicarakan masalah kesenjangan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari persoalan kemiskinan. *J. Muller (dalam Prisma, 1980)* menunjukkan bahwa kemiskinan sebagai fenomena yang menghalangi orang-orang miskin mengambil bagian dalam kesempatan yang sebenarnya ada, termasuk kesempatan memperoleh pendidikan, disebabkan oleh ketimpangan struktur institusional dalam masyarakat. Kemiskinan tidak hanya berarti hidup secara sederhana dan sahaja, melainkan berupa kelaparan yang nyata atau paling tidak malnutrisi. Tahun 2005 ini saja di Indonesia terjadi beberapa bencana kelaparan dan kekurangan gizi, busung lapar anak, hingga menewaskan warganya, di Nusa Tenggara Timur dan terakhir ini di Kabupaten Yahukimo, Papua, di mana masih terdapat banyak desa terpencil di pegunungan yang letaknya di ketinggian 700 m. Korban di Papua lebih parah karena menelan korban meninggal hingga 55 orang. Berita di MetroTV, 11 dec -05, menyebutkan jumlah korban sebesar itu bukan diakibatkan kelaparan saja namun berbagai penyakit malaria maupun cacangan.

Mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi untuk sementara bisa dilakukan dengan mengirimkan bantuan makanan maupun obat-obatan. Akan tetapi persoalan muncul ketika mengetahui akibat kekurangan gizi atau kelaparan ini di kemudian hari karena akan jauh lebih buruk. Makanan bergizi sangat dibutuhkan anak sejak bayi dalam kandungan, ketika pembentukan otak, bahkan hingga lahir. Seorang Ibu yang mengandung dan kekurangan gizi karena kelaparan sangat

mempengaruhi kondisi gizi sang bayi, yang akan mempengaruhi pertumbuhannya, demikian juga anak pada tahun-tahun pertama pertumbuhannya atau usia balita akan jauh lebih buruk akibatnya. Kecerdasan anak akan mengalami gangguan yang ditunjukkan dengan berkurangnya kecepatan daya tangkap, kemampuan berkonsentrasi, kemampuan mengungkapkan diri. Pada sisi lain *J. Muller* mengemukakan juga beberapa hal bahwa:

1. Kemiskinan ekonomi keluarga sangat menghambat proses pendidikan anak,
2. Proses sosialisasi dalam keluarga yang terganggu
3. Keterbatasan taraf pendidikan orang tua
4. Hambatan kemampuan berbahasa
5. Kebudayaan bisu
6. Struktur kelembagaan yang menindas.

Keberhasilan bersekolah memerlukan tenaga dan waktu, perjuangan yang luar biasa. Untuk setara SD setiap hari menghabiskan waktu 6 – 7 jam, SLTP butuh waktu sedikit lebih banyak dan mungkin pelajaran ekstra hingga sore hari di sekolah. Barangkali anak-anak dari keluarga miskin tidak pernah berpikir tentang sarapan pagi bergizi, atau jajan makanan yang sehat di sekolah, waktu istirahat akan habis oleh kegiatan bermain di lingkungan sekolah. Bila harus bekerja setelah selesai sekolah, maka waktu belajar mungkin akan habis untuk istirahat dan tidur di malam hari.

Sosialisasi dalam keluarga untuk membangun identitas budaya sekolah hilang karena komunikasi keluarga tidak memperoleh ruang yang memadai. Kegiatan mencari nafkah yang mengandalkan kekuatan otot dari pagi hingga sore atau malam hari orang tua mereka menyebabkan peluang itu tertutup. Pada umumnya secara fisik maupun psikis orang tidak sanggup lagi memberi perhatian yang wajar pada semua kebutuhan anak-anaknya terutama kebutuhan, yang menurut *J. Muller*, "rangsangan mental" (mental stimulation). Jadi harmonisasi komunikasi antar pribadi dalam keluarga sangat mendukung

perkembangan mental belajar, atau paling lingkungan belajar yang demikian taraf pendidikan menjadi variabel yang isi komunikasi antara sehingga juga men menentukan bagaimana di bangun. Di per kaya dan berpen komunikasi ini sering karena kesibukan be hampir tidak punya w mereka mampu me rumah serta menyias mengikutsertakan k vate agar anak tetap sekolah dengan kual

Lingkungan ber keanekaragaman perso berpeluang membuka bangun bahasa yang mereka mampu meref atau memecahkan mas kan abstraksi lebih ting sekedar untuk mema disediakan, tetapi a berpikir yang dice berbahasa yang runt tata bahasa dan perber merumuskan dengan apa yang dipikirkan da dan berani mengungk banyak orang. Kembali orang tua keluarga mis yang kurang memilik banyak, kemampuan be SD hanya untuk se tergantung dari bakat belajar, karena menurut mutu komunikasi ve dan anak mereka me mereka memperoleh mengembangkan kem mereka.

Sejarah pembertonesia sarat dengan p dan penindasan yang kebudayaan kemelaratan

perkembangan mental anak dalam motivasi belajar, atau paling tidak membentuk lingkungan belajar yang memadai. Namun demikian taraf pendidikan orang tua bisa menjadi variabel yang ikut memberi warna isi komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga juga merupakan variabel yang menentukan bagaimana lingkungan belajar di bangun. Di perkotaan, dalam keluarga kaya dan berpendidikan walaupun komunikasi ini sering mengalami masalah karena kesibukan bekerja orang tua hingga hampir tidak punya waktu untuk anak, tetapi mereka mampu membangun lingkungan rumah serta meniasasi kondisi itu dengan mengikutsertakan kursus maupun les private agar anak tetap dapat menyelesaikan sekolah dengan kualitas yang baik.

Lingkungan bergaul yang lebih luas, keanekaragaman persoalan dalam masyarakat berpeluang membuka pikiran anak membangun bahasa yang lebih baik, sehingga mereka mampu merefleksikan pikiran-pikiran atau memecahkan masalah yang membutuhkan abstraksi lebih tinggi. Bersekolah bukan sekedar untuk memahami mata ajar yang disediakan, tetapi anak didik mampu berpikir yang dicerminkan dari cara berbahasa yang runtut, jelas, logis, menguasai tata bahasa dan perbendaharaan kata, mampu merumuskan dengan jelas dan tepat dari apa yang dipikirkan dan dirasakan, mampu dan berani mengungkapkan diri di depan banyak orang. Kembali lagi kita menyalahkan orang tua keluarga miskin dengan lingkungan yang kurang memiliki akses informasi yang banyak, kemampuan berbahasa ini di tingkat SD hanya untuk sebagian kecil orang tergantung dari bakat alamiah dan ketekunan belajar, karena menurut *J. Muller bentuk dan mutu komunikasi verbal antara orang tua dan anak mereka menentukan sejauh mana mereka memperoleh rangsangan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa mereka.*

Sejarah pembentukan masyarakat Indonesia sarat dengan proses pembodohan dan penindasan yang membentuk suatu kebudayaan kemelaratan. Orang miskin bukan

saja mereka "kurang punya" dalam banyak hal tetapi mereka sebenarnya terbelenggu oleh kultur "melarat" atau "miskin". Kita lihat berapa orang yang menjadi korban rebutan uang tunai subsidi BBM atau kompensasi BBM oleh pemerintah yang ditujukan kepada orang miskin, perilaku anarkhis dan sebagainya. Kalau kita pergi ke desa-desa banyak di antara orang-orang yang mengaku miskin untuk memperoleh Kartu Kompensasi BBM, walaupun sebenarnya mereka sangat mampu bekerja dan mandiri, suara mereka keluar dan mempersoalkan dengan energi yang berlebihan ketika menyentuh persoalan perut dan uang yang jumlahnya sedikit sekalipun. *Paulo Freire* dengan cerdas mengemukakan kultur itu dengan istilah "kebudayaan bisu" (culture of silence), yaitu tata nilai, sikap mental, dan pola tingkah laku rakyat miskin tidak bisa dipahami lepas dari kenyataan kemiskinan itu sendiri serta sebab musababnya, yang membuat rakyat itu bagaikan orang-orang yang tidak mampu bersuara.

Struktur lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat yang semestinya berlaku dan ikut membantu membebaskan orang dari belenggu kemiskinan, tetapi justru memberi porsi peran yang relatif tidak sedikit dalam melestarikan ketertindasan dan kemiskinan, melestarikan rasa ketidakadilan. Struktur lembaga-lembaga itu dikuasai oleh para pemilik modal, pemimpin-pemimpin daerah yang tidak berempati pada kehidupan kaum miskin dan tertindas. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana para petani mempertahankan tanah pertanian yang akan digunakan untuk perluasan lapangan terbang di Selaparang, Lombok. Para petani jelas tidak membutuhkan pesawat terbang untuk membajak sawah, tetapi orang-orang yang datang dan pergi dengan pesawat terbang yang ingin melakukan eksploitasi sumber alam pulau ini yang mungkin lebih membutuhkan tanah-tanah petani. Kelaparan dan kekurangan gizi di Kabupaten Yahukimo, Papua, hingga membuat SBY marah, adalah kesalahan para pemimpin daerah yang berorientasi kepada kepentingan proyek di

Jakarta, yang tentunya orang-orang di Jakarta juga ikut melanggengkan ketertinggalan perkembangan Papua. Dalam dunia pendidikan modern pelanggaran kemiskinan nampak dari penerimaan siswa baru, selain melewati ujian saringan yang mungkin hanya bisa diselesaikan oleh siswa dari golongan mampu dan berasal dari sekolah lebih baik, masih ditambah dengan pembayaran uang Pembangunan, SPP, BP3, OSIS, seragam, buku, dan lain-lain. Bahkan di Jawa Tengah pengadaan buku, seragam, merupakan proyek yang menguntungkan bagi kelompok yang berada di level atas dalam struktur lembaga pendidikan, proyek yang membuka peluang korupsi pejabat.

2. Ekonomi - Politik Pendidikan

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Indonesia pada kenyataannya tidak terjadi, terlebih lagi pendidikan yang berkualitas, dengan kelengkapan sarana pendidikan yang baik. Walaupun demikian apakah ketimpangan akan semakin parah bila liberalisasi pendidikan memperoleh tempat persemiaan yang subur, kesenjangan pendidikan kota desa akan semakin besar, kelompok *the upper class* akan tetap memperoleh pendidikan lebih baik dari pada yang di bawahnya, karena uang bisa menjadi jaminan untuk memperoleh pendidikan lebih baik itu?

Tuntutan liberalisasi dimulai dari bidang ekonomi, yang menurut *Charles Frankel* bermula dari tuntutan keberhasilan para pengusaha memperkuat gagasan bahwa perlu ada suatu lingkungan yang bebas dari campur tangan negara yang memberi peluang untuk berkarya dan mengembangkan inisiatif pribadi. Keberhasilan ini juga mengembangkan dalam masyarakat suatu sikap yang menguntungkan buat kebebasan intelektual, persaingan politik yang terbuka, dan seluruh jaringan asosiasi sukarela yang merupakan ciri khas masyarakat liberal (*Frankel*, dalam *Miriam Budiardjo*, 1984). *Milton Friedman* menambahkan bahwa ada dua cara untuk mengkoordinasikan aktifitas

jutaan manusia di bidang ekonomi:

1. bimbingan terpusat yang melibatkan penggunaan paksaan- tekniknya tentara dan negara totaliter yang modern.
2. kerjasama individual secara sukarela – tekniknya sebuah sistem pasaran bebas.

Usaha untuk mengatur aktifitas ekonomi melalui sistem pasaran adalah akan mencegah campur tangan seseorang terhadap orang lain, selama kebebasan untuk bertransaksi dipertahankan secara efektif. Selanjutnya dijelaskan bahwa eksistensi pasaran bebas sudah barang tentu tidak melenyapkan kebutuhan akan adanya pemerintah. Yang dilakukan oleh pasaran ini adalah mengurangi jumlah persoalan yang harus diputuskan melalui jalur politik, dan dengan demikian mengurangi perlunya pemerintah berpartisipasi secara langsung dalam aktifitas ini. Dengan dilepaskannya pengaturan aktivitas ekonomi dari pengendalian pemimpin politik, sistem pasaran melenyapkan sumber dari kekuasaan memaksa. Ia memungkinkan kekuatan ekonomi menjadi pembatas terhadap kekuasaan politik dari pada menjadi hal yang menguatkannya. (*Friedman*, dalam *Miriam Budiardjo*, 1984).

Liberalisasi pendidikan memiliki berbagai keuntungan antara lain para pemilik modal secara individu maupun kelompok secara bebas bisa mendirikan lembaga pendidikan, sehingga secara kuantitas jumlah sekolah dari SD hingga Perguruan Tinggi semakin banyak. Tentunya ini akan membangun kompetisi kualitas pendidikan yang lebih baik, kualitas pengajar, kelengkapan prasarana yang memadai, kurikulum yang selalu berkembang, sistem rekrutmen siswa disesuaikan dengan orientasi standard masing-masing sekolah. Semua itu membuka banyak pilihan bagi masyarakat untuk bersekolah yang menjadi pilihannya sepanjang masyarakat memenuhi persyaratan yang ditentukan dan tentunya mampu "membeli" nya.

Walaupun demikian sisi-sisi lain perlu

memperoleh pertin liberalisasi akan menu bagi banyak orang karakter deskrimina Kalau sistem ini ber melanggengkan sist lembaga-lembaga pe mendidik generasi "class" menjadi "se akan memperko kapitalisme, menger maupun reproduksi

3. Momen Kebij

Nampaknya harga BBM dengan minyak dunia menj dunia pendidikan. B keluarga yang dulu miskin sekali d menyekolahkan anak keluarga-keluarga itu, berita di koran, keterpurukan luar bi kapal-kapal banyak y nelayan tidak mamp BBM sangat tinggi. S anak-anak mereka k ditarik dari sekolah bayar SPP. Walaupun kebijakan melakukan Operasional Sekolah keluarga itu mempe atau BLT yang di keluarga miskin, kesenjangan pendid Operasional Sekolah pemerintah pusat ke MI dan SMP/MTs se maupun negeri. BOS ke rekening sekolah dapat digunakan u bahkan menghapus b selama ini dibeban Besarnya BOS ini a per siswa per tahun dan Rp 324.500,00 a untuk siswa SMP/MT

memperoleh pertimbangan politik karena liberalisasi akan menutup kesempatan belajar bagi banyak orang melarat, membangun karakter deskriminatif yang sangat jahat. Kalau sistem ini berkembang untuk tujuan melanggengkan sistem kapitalisme, maka lembaga-lembaga pendidikan itu hanya akan mendidik generasi muda dari "the upper class" menjadi "sekrup-sekrup" kecil yang akan memperkokoh mesin besar kapitalisme, mengembangkan jaringannya, maupun reproduksi kapitalnya.

3. Momen Kebijakan BBM

Nampaknya kebijakan mengubah harga BBM dengan menyesuaikan harga minyak dunia menjadi petaka nasional di dunia pendidikan. Banyak anak-anak dari keluarga yang dulunya dianggap belum miskin sekali dan masih mampu menyekolahkan anak kini kesulitan. Di antara keluarga-keluarga itu, kalau kita mencermati berita di koran, nelayan mengalami keterpurukan luar biasa. Tongkang maupun kapal-kapal banyak yang diparkir di pantai, nelayan tidak mampu melaut karena harga BBM sangat tinggi. Sudah dapat kita duga anak-anak mereka kemungkinan besar juga ditarik dari sekolah karena tidak mampu bayar SPP. Walaupun pemerintah mengambil kebijakan melakukan subsidi dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), atau mungkin keluarga itu memperoleh rembesan KKB atau BLT yang dikategorikan sebagai keluarga miskin, akankah persoalan kesenjangan pendidikan teratasi? Bantuan Operasional Sekolah merupakan bantuan pemerintah pusat kepada seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs se Indonesia – swasta maupun negeri. BOS ini dikirimkan langsung ke rekening sekolah secara langsung yang dapat digunakan untuk mengurangi atau bahkan menghapus biaya pendidikan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat. Besarnya BOS ini adalah Rp 235.000,00 per siswa per tahun untuk siswa SD/MI dan Rp 324.500,00 per siswa per tahun untuk siswa SMP/MTs. Namun demikian

sangat tidak realistis jumlah bantuan tersebut bila digunakan untuk meng"gratis"kan biaya sekolah siswa, bahkan pemerintah dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa BOS hanya meng-cover 30% dari cost siswa (lihat: Budiya: *Memaknai Bantuan Operasional Sekolah*, Harian Kompas, 17 Oktober 2005, hal. 14)

Penulis melalui kesempatan ini telah mewawancarai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kendal sehubungan dengan Bantuan Operasional Sekolah sebagai komitmen pemerintah mengalihkan subsidi BBM. Di Sekolah Dasar Negeri Sukodono BOS sangat berarti karena memberi subsidi setiap siswa sebesar Rp. 19.500,00, setiap bulan. Artinya siswa sama sekali tidak dibebani uang sekolah lagi, dan siswa dari uang itu masih memperoleh pakaian olah raga gratis, buku-buku sekolah, seragam sekolah dibeli oleh siswa sendiri. Sekolah bisa menambah Guru Tidak Tetap (GTT) dan Penjaga Sekolah Tidak Tetap (PTT), yang dibayar secara honorer dari Bantuan Operasional Sekolah.

Namun demikian bagi siswa sekolah di Sekolah Dasar Negeri Patukangan 2, yang merupakan sekolah unggulan di kabupaten Kendal, salah satu orang tua siswa kelas I di sekolah tersebut mengakui telah mengeluarkan biaya Rp. 300.000,00 untuk membayar pembangunan laboratorium. Walaupun tidak lagi membayar uang sekolah, tetapi buku-buku; seragam sekolah dan olah raga bagi siswa dibeli oleh siswa sendiri. Beberapa SLTP di Kendal masih menyelenggarakan pendidikan dengan mengandalkan iuran siswa, walaupun telah menerima BOS dari pemerintah. Kalau pemerintah tetap konsisten dengan kebijakannya mengangkat kembali derajat pendidikan kita tentunya biaya Bantuan Operasional Sekolah seharusnya di tahun-tahun mendatang anggarannya diperbesar. Karena untuk SLTA jumlah bantuan subsidi tersebut jauh dari mencukupi, beban sekolah lebih besar dibanding SLTP maupun SD. Untuk mengejar kualitas SLTA saja diperlukan kelengkapan laboratorium, jam

ekstra untuk menyesuaikan standard masuk ke Perguruan Tinggi lebih banyak yang berarti ada honor tambahan. Hal ini berkaitan dengan asumsi bahwa kualitas SLTA diukur dari banyaknya jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri.

C. Penutup

Walaupun kesenjangan pendidikan sulit diatasi, karena persoalannya berkaitan dengan berbagai variabel seperti kondisi sosial, ekonomi, kebudayaan. Namun demikian pemerintah harus terus memberi peluang bagi kehidupan demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan berisi prinsip keseimbangan antara nilai individual dan sosial. Karena itu di terdapat semangat persamaan maupun penghargaan pada individualita. Setiap orang dalam masyarakat berhak memperoleh kesempatan mengembangkan diri guna mencapai sesuatu yang diinginkan, kesempatan memperoleh pendidikan yang baik.

Niat baik pemerintah memberi perhatian pada dunia pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), UU Guru dan Dosen perlu memperoleh dukungan dan masukan untuk pengembangannya. Awal reformasi pendidikan ini hendaknya mengarah pada membangun sistem pendidikan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dengan tidak mengabaikan:

1. Secara kuantitatif melakukan rehabilitasi dan pembangunan sekolah-sekolah baru, mengangkat guru-guru berkualitas untuk ditempatkan merata di seluruh pelosok desa di Indonesia, penghapusan uang sekolah dari

SD hingga SLTA atau bila mungkin hingga Perguruan Tinggi. Penyediaan sarana pendukung pendidikan yang lengkap dengan jenis sama dan merata, serta terus menerus diperbaiki di seluruh Indonesia.

2. Secara kualitatif, pemerintah wajib mengutamakan kualitas pendidikan. Karena masyarakat desa dan lapisan bawah di perkotaan berhak memperoleh kesempatan pendidikan dengan mutu atau kualitas pendidikan yang setara dengan golongan "The Upper Class". Kita sama sekali tidak boleh melupakan bahwa liberalisasi pendidikan sangat deskriminatif, oleh karenanya masyarakat dalam "kultur melarat atau miskin" harus memperoleh preferensi.

Daftar Pustaka

Budiardjo, Mirriam, 1984, *Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi; Gramedia, Jakarta*

Devito, Joseph A, 2001, *The Interpersonal Communication Book, Longman, New York, USA*

M. Dawam Rahardjo, 1988, *Esei-esei Ekonomi - Politik, LP3ES, Jakarta*

Giddens, Anthony, 1986, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, UI Press, Jakarta*

Prisma: Mencari Kiblat Pendidikan, No. 7 Juli 1980, LP3ES, Jakarta.

Abstract :
To get a detail p...
sian system, the...
comparation with...
order to improve...
better understand...
This article partic...

A. Pend

W.D. Kendal da...
tive Education : Con
Trends " (dalam Ag...
mensinyalir bahwa pa...
atau negara berada d...
siapa dirinya, dalam...
berada dalam status...
dan hilang pedoman...
itu manusia atau neg...
perbandingan dengan...
lain, sehingga akhirny...
diri sebenarnya.

Sistem pendid...
dibandingkan dengan ne...
mengetahui sistem dirin...
meningkatkan dirinya.

Tujuan perband...
untuk mengetahui pe...
kekuatan atau faktor ap...
dan prinsip-prinsip yan...
sistem pendidikan n...
dibandingkan.

Artikel ini mem...
Cina (RRC) sebagai nega...
dengan Indonesia. Terd...
memilih RRC sebagai...
Muhammad SAW me...
muslimin mencari ilmu...
Cina, apakah yang men...
ini yang akan dipelajar...

* Staf Pengajar Prodi Admini...